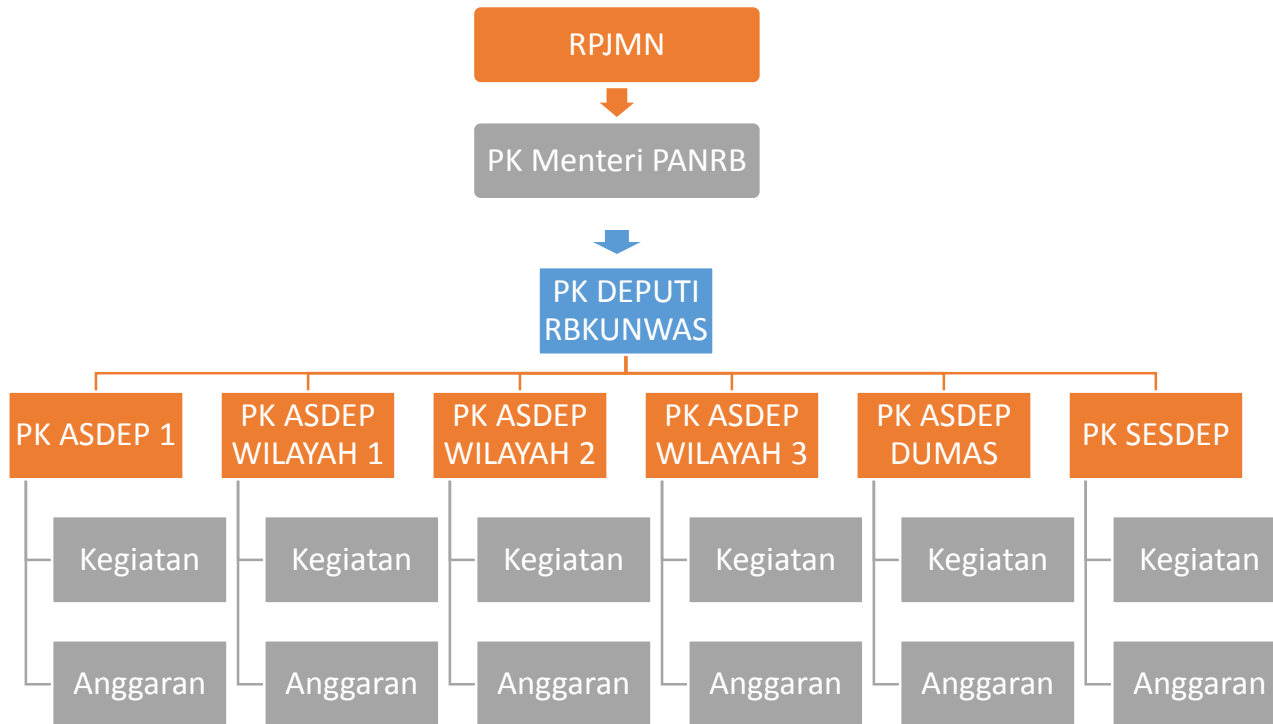


Cascading Perjanjian Kinerja

Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan



Permasalahan Umum

**PERJANJIAN KINERJA
MENTERI PANRB
TAHUN 2017**

SS 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	
IK 1.1	Presentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 75 % Prov: 40% Kab/Kota: 25%

SS 5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
IK 5.1	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	65
IK 5.2	Persentase IP nilai Akuntabilitas Kinerja "baik"	K/L: 80% Prov: 57% Kab/Kota: 31%

SS 6	Meningkatnya penerapan sistem integritas	
IK 6.1	Skor integritas nasional	55
IK 6.2	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP

SS 8	Terwujudnya Kem. PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	
IK 8.1	Indeks RB	81
IK 8.2	Opini BPK	WTP
IK 8.3	Nilai akuntabilitas Kinerja	81

**PERJANJIAN KINERJA DEPUTI RBKUNWAS
TAHUN 2017**

SS 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	
IK 1.1	Presentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 75 % Prov: 40% Kab/Kota: 25%

SS 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
IK 2.1	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	65
IK 2.2	Persentase IP nilai Akuntabilitas Kinerja "baik"	K/L: 80%; Prov: 57% Kab/Kota: 31%
IK 2.3	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tepat waktu	1 Laporan
IK 2.4	Jumlah IP yang telah menerapkan e-performance based budgeting	18 IP

SS 3	Meningkatnya penerapan sistem integritas	
IK 3.1	Skor integritas nasional	55
IK 3.2	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP
IK 3.3	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan LHKASN	K/L: 100%; Prov: 80% Kab/Kota: 60%
IK 3.4	Persentase Instansi Pemerintah yang telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi	K/L: 100%; Prov: 80% Kab/Kota: 30%

**PERJANJIAN KINERJA
MENTERI PANRB
TAHUN 2017**

SS 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	
IK 1.1	Presentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 75 % Prov: 40% Kab/Kota: 25%
SS 5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
IK 5.1	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	65
IK 5.2	Persentase IP nilai Akuntabilitas Kinerja "baik"	K/L: 80% Prov: 57% Kab/Kota: 31%
SS 6	Meningkatnya penerapan sistem integritas	
IK 6.1	Skor integritas nasional	55
IK 6.2	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP
SS 8	Terwujudnya Kem. PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	
IK 8.1	Indeks RB	81
IK 8.2	Opini BPK	WTP
IK 8.3	Nilai akuntabilitas Kinerja	81

**PERJANJIAN KINERJA DEPUTI RBKUNWAS
TAHUN 2017**

SS 4	Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan	
IK 4.1	Persentase penanganan permasalahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan	90%
SS 5	Terwujudnya Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan yang profesional dan berkinerja tinggi	
IK 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan	BB
IK 5.2	Nilai akuntabilitas kinerja Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan	A
IK 5.3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan	3,2
IK 5.4	Persentase pengelolaan keuangan (anggaran) yang bebas dari temuan material	100%

PROSES BISNIS PENCAPAIAN KINERJA

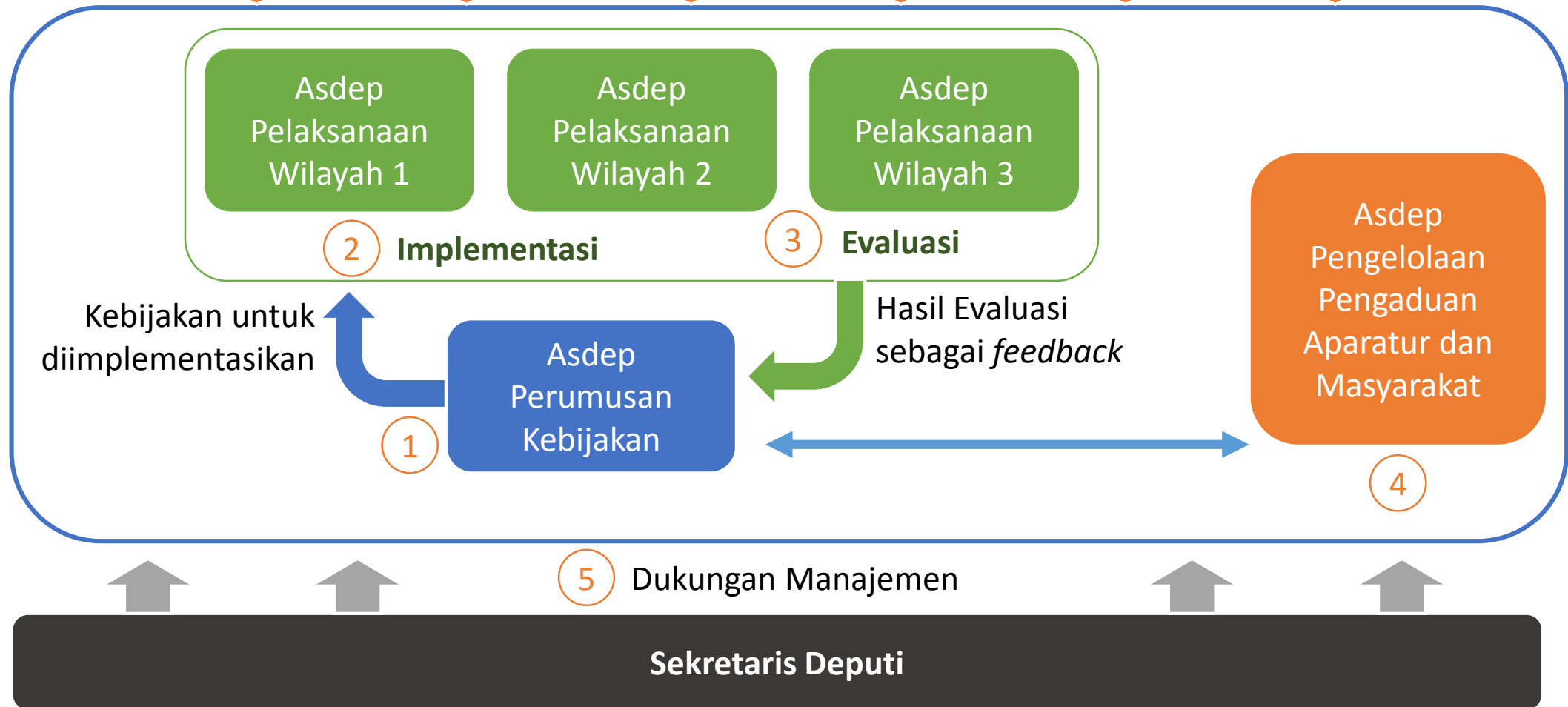
PERJANJIAN KINERJA DEPUTI RBKUNWAS

TAHUN 2017

SS 1 Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi SS 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SS 3 Meningkatnya penerapan sistem integritas

SS 4 Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan

SS 5 Terwujudnya Deputy RB, Akuntabilitas dan Pengawasan yang profesional dan berkinerja tinggi



DEPUTI RBKUNWAS

SS 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	
IK 1.1	Presentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 75 % Prov: 40% Kab/Kota: 25%

SS 3	Meningkatnya penerapan sistem integritas	
IK 3.1	Skor integritas nasional	55
IK 3.2	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP
IK 3.3	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan LHKASN	K/L: 100%; Prov: 80% Kab/Kota: 60%
IK 3.4	Persentase Instansi Pemerintah yang telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi	K/L: 100%; Prov: 80% Kab/Kota: 30%

SS 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
IK 2.1	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	65
IK 2.2	Persentase IP nilai Akuntabilitas Kinerja "baik"	K/L: 80%; Prov: 57% Kab/Kota: 31%
IK 2.3	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tepat waktu	1 Laporan
IK 2.4	Jumlah IP yang telah menerapkan e-performance based budgeting	18 IP

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN

Memastikan tersedianya kebijakan RBKUNWAS yang bisa diimplementasikan dan mendukung keberhasilan RB, Akuntabilitas dan Pengawasan

Tersedianya kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan yang implementatif

Jumlah kebijakan tentang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan

Persentase IP yang menyampaikan LapKin

Persentase IP yang menyampaikan PMPRB

Persentase IP yang mengusulkan unit kerja percontohan Zona Integritas

ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN

Tersedianya kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan yang implementatif

Jumlah kebijakan tentang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan

Persentase IP yang menyampaikan LapKin

Persentase IP yang menyampaikan PMPRB

Persentase IP yang mengusulkan unit kerja percontohan Zona Integritas



KABID PERUMUSAN KEBIJAKAN RB / AKUNTABILITAS / PENGAWASAN

Tersedianya rumusan kebijakan

Jumlah kebijakan

Tersedianya analisis dan rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan

Persentase rekomendasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan

Terlaksananya penyelarasan kebijakan dengan instansi terkait

Jumlah laporan hasil penyelarasan kebijakan dengan instansi terkait

Jumlah instansi yang memiliki keselarasan kebijakan

KABID PERUMUSAN KEBIJAKAN RB / AKUNTABILITAS / PENGAWASAN

Tersedianya rumusan kebijakan

Jumlah kebijakan

Tersedianya analisis dan rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan

Persentase rekomendasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan

Terlaksananya penyelarasan kebijakan dengan instansi terkait

Jumlah laporan hasil penyelarasan kebijakan dengan instansi terkait

Jumlah instansi yang memiliki keselarasan kebijakan

KASUBID ANALIS PERUMUSAN KEBIJAKAN RB / AKUNTABILITAS / PENGAWASAN

Tersedianya rancangan awal kebijakan

Jumlah telaahan / analisis

Jumlah draft kebijakan